

**Pengaruh Demokrasi, *Government Effectiveness*, dan Investasi
Terhadap *Gross Domestic Product* (GDP)
(Studi Kasus di Negara Organisation for Economic
Co-Operation and Development)**

(Tesis)

Oleh

Senna Enzovani



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**Effects of Democracy, Government Effectiveness, and Investment
Against the Gross Domestic Product (GDP)**

By

Senna Enzovani

ABSTRACT

This research is a study that aims to determine the influence of democracy, government effectiveness and investment on gross domestic product (GDP) in countries that are members of the OECD. This study uses a population of OECD countries that have 34 member countries. The results of the study using panel data regression prove that democratic and government effectiveness variables have a positive and statistically significant effect on GDP, besides the results of the study also prove that investment variables positively influence GDP in OECD countries but are not significant, thus the hypothesis who stated that the alleged investment had an effect on GDP in the OECD-affiliated countries, was rejected.

Keywords: Gross Domestic Product (GDP), Democracy, Government Effectiveness, and Investment.

**Pengaruh Demokrasi, *Government Effectiveness*, dan Investasi
Terhadap *Gross Domestic Product* (GDP)**

Oleh

Senna Enzovani

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh demokrasi, *government effectiveness* dan investasi terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) di negara yang tergabung dalam OECD. Penelitian ini menggunakan populasi negara OECD yang memiliki 34 negara anggota. Hasil penelitian menggunakan regresi data panel membuktikan bahwa variabel demokrasi dan *government effectiveness* berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap GDP, selain itu hasil penelitian juga membuktikan bahwa variabel investasi berpengaruh secara positif terhadap GDP di negara yang tergabung dalam OECD namun tidak signifikan, dengan demikian hipotesis yang menyatakan diduga investasi berpengaruh terhadap GDP di negara yang tergabung dalam OECD, ditolak.

Kata Kunci : *Gross Domestic Product* (GDP), Demokrasi, *Government Effectiveness*, dan Investasi.

**PENGARUH DEMOKRASI, *GOVERNMENT EFFECTIVENESS*, DAN
INVESTASI TERHADAP *GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)*
(Studi Kasus di Negara *Organization for Economic
Co-Operation Development*)**

Oleh

Senna Enzovani

(Tesis)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Tesis : **PENGARUH DEMOKRASI, GOVERNMENT EFFECTIVENESS, DAN INVESTASI TERHADAP GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)**
(Studi Kasus di Negara *Organization for Economic Co-Operation Development*)

Nama Mahasiswa : **Senna Enzovani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1521021013

Konsentrasi : Ekonomi Publik dan Fiskal

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Marselina, S.E., M.P.M.
NIP 19670710 199003 2001

Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP 19611209 198803 1 003

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Ketua Program Studi

Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP 19611209 198803 1 003

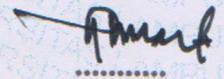
MENGESAHKAN

1. Komisi Penguji :

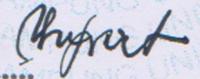
1.1 Ketua Komisi Penguji : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.
(Pembimbing I)



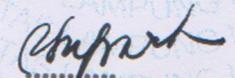
1.2 Anggota Komisi Penguji : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
(Penguji I)



1.3 Anggota Komisi Penguji : Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M.
(Penguji II)

an. 

1.4 Sekretaris Komisi Penguji : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
(Pembimbing II)



Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



3. Direktur Program Pasca Sarjana



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 020



4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 28 Oktober 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **”Pengaruh Demokrasi, *Government Effectiveness*, dan Investasi Terhadap *Gross Domestic Product (GDP)*, (Studi Kasus di Negara *Organization for Economic Co-Operation and Development*)”** adalah karya saya dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2019
Pembuat Pernyataan,



Senna Enzovani
NPM. 1521021013

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Senna Enzovani, lahir pada tanggal 28 Oktober 1989 di Bandar Lampung. Penulis lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Traswan Surapati dan Ibu Efrordine Lediana. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Pertiwi pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1995. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Teladan Rawa Laut, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun yang sama, dan selesai pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung melalui jalur SPMB pada Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang sekarang sudah berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Penulis menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung program magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi. Penulis menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019.

MOTO

“If you have passed the start line, then you have to reach the finish line”

(Senna Enzovani)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan”

(QS 94 : 6)

“Good thoughts, good words, good deeds”

(Bomi Bulsara / Freddie Mercury's father)

Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, dukungan do'a, moril, dan materi yang tak terbatas, serta didikannya agar aku menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin. Serta kakak dan adikku yang telah memberikan perhatian dan semangat.

Almamater tercinta, Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pengaruh Demokrasi, *Government Effectiveness*, dan Investasi terhadap *Gross Domestic Product* (studi kasus negara-negara yang tergabung dalam OECD, tahun 2013-2017)" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian tesis ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku dosen pembimbing pertama.
2. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua sekaligus ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi.
3. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama, sekaligus ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M. selaku dosen penguji kedua.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di Universitas Lampung.
6. Para staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis, Sella, Andri, Mas Nanang, Mbak Mimi, ibu Yati dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

7. Keluarga, ayah, ibu, kakak, adik dan para kerabat yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan do'a.
8. Teman-teman FEB MIE 2015-2016, Ari, bang Ferry, Rinaldi, Finidya, Gista, Desita, Ivo, Tasha, mbak Dwi, mbak Mayra, Rully, Guntur, Genio, Ridho, ibu Supriyanti, Deffa, Nova, Desy, Dina, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
9. Teman-teman lain dan alumni FEB yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis, Helmi, David, Devin, Andre, Jeffie, Rahmat, Chandra, Oye, Bimo, om Yudhinanto, Soni, Bima, Dika, Reza, Bambang, Hendrik, Novi, Fischa, Yudha, Danny, Pandy. Dan yang selalu membantu, memberi dukungan, semangat untuk penulis dalam kondisi apapun, Tamara.

Semoga Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa membalas semua kebaikan yang telah diberikan, dan semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Oktober 2019
Penulis,

Senna Enzovani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	17
A. <i>Gross Domestic Product (GDP)</i>	17
B. Tinjauan Tentang Demokrasi.....	20
C. <i>Government Effectiveness</i>	26
D. Investasi.....	30
E. Penelitian Terdahulu	34
F. Kerangka Pemikiran.....	35
G. Hipotesis.....	37
III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sumber Data	38
B. Populasi dan Sampel Penelitian	38
C. Definisi Operasional Variabel.....	39
D. Model Penelitian	41
E. Metode Analisis	41
F. Uji Hipotesis	47

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Sekilas tentang the <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (OECD)	49
B. Analisis Data	51
C. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel.....	59
D. Pengujian Hipotesis.....	61
E. Pembahasan.....	64
V. SIMPULAN DAN SARAN	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Demokrasi Berdasarkan Tipe Rezim, Tahun 2017.....	4
2. GDP Negara OECD Tahun 2013-2017 (Dalam Dollar AS)	8
3. Indeks Demokrasi Negara-negara OECD.....	10
4. Indeks Efektivitas Pemerintah (2013 – 2017).....	12
5. Foreign Direct Investment, per GDP (% , 2013- 2017).....	13
6. Penelitian Terdahulu	34
7. Nama Variabel, Simbol Variabel, Ukuran, dan Sumber Data	40
8. GDP Negara OECD Tahun 2013-2017.....	52
9. Indeks Demokrasi Negara OECD Tahun 2013-2017.....	54
10. <i>Government effectiveness</i> Negara OECD Tahun 2013-2017.....	56
11. FDI Negara OECD Tahun 2013-2017	58
12. Hasil tes <i>Rebundant Fixed Effect-Likelihood Ratio</i>	59
13. Hasil uji Hausman.....	60
14. Perbandingan model PLS, FEM, REM	60
15. Hasil Uji F-Statistik	63
16. Hasil Uji Parsial (Uji t-statistik).....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Negara Sampel Penelitian
2. Data Penelitian
3. Hasil Estimasi Data Panel dengan Pooled Least Square Model
4. Hasil Estimasi Data Panel dengan Fixed Effect Model
5. Hasil Estimasi Data Panel dengan Random Effect Model
6. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow
7. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Indeks Williamson (Nilai), Tenaga Kerja (Jiwa), Investasi Swasta (Juta Rp), Dana Alokasi Bantuan Pembangunan (Juta Rp) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012	L1
2. Data Indeks Williamson (Nilai), Tenaga Kerja, Investasi Swasta, Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 yang dimasukkan kedalam Eviews (Data Tenaga Kerja, Investasi Swasta, Dana Alokasi Bantuan Pembangunan diubah kedalam bentuk Logaritma Natural).....	L2
3. Jumlah Penduduk Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (Jiwa).....	L3
4. PDRB per Kapita atas harga konstan Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012.....	L4
5. Penanaman Modal dalam Negri / PMDN Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (jt Rp)	L5
6. Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (jt Us).....	L6
7. Jumlah PMA dan PMDN Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (jt Rp).....	L7
8. Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (jiwa).....	L8
9. Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (jiwa).....	L9

10. Dana Alokasi Umum Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (Jt Rp).....	L10
11. Dana Alokasi Khusus Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (Jt Rp).....	L11
12. Jumlah DAU dan DAK (DAB) Kabupaten /Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (Jt Rp)	L12
13. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten /Kota Provinsi Lampung	L13
14. Hasil Estimasi Data Panel dengan Pooled Least Square Model menggunakan White Cross Section Covariance	L14
15. Hasil Estimasi Data Panel dengan Fixed Effect Model menggunakan White Cross Section Covariance.....	L15
16. Hasil Estimasi Data Panel dengan Random Effect Model menggunakan White Cross Section Covariance.....	L16
17. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman menggunakan White Cross Section Covariance	L17

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1. Indeks Demokrasi Negara Dunia Tahun 2017	3
2. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	37

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah output yang dihasilkan selama periode tertentu. Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian adalah GDP. GDP adalah induk dari semua indikator dunia. Sebagai ukuran keseluruhan dari total produksi ekonomi suatu negara, GDP menggambarkan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi pada periode waktu tertentu, termasuk konsumsi pribadi, pembelanjaan pemerintah, persediaan pribadi, setoran biaya konstruksi dan balance perdagangan luar negeri (ekspor ditambahkan, sedangkan impor dikurangkan).

Sedangkan menurut Dewi dkk (2015), pembangunan ekonomi selama ini baru dianalisis dari faktor-faktor ekonomi semata seperti pajak, FDI (*Foreign Direct Investment*), investasi, inflasi, suku bunga. Salah satu faktor yang sifatnya kuantitatif dan belum banyak diteliti adalah dari bentuk pemerintahan, salah satu bentuk pemerintahan yang paling banyak dipakai oleh negara di dunia adalah demokrasi.

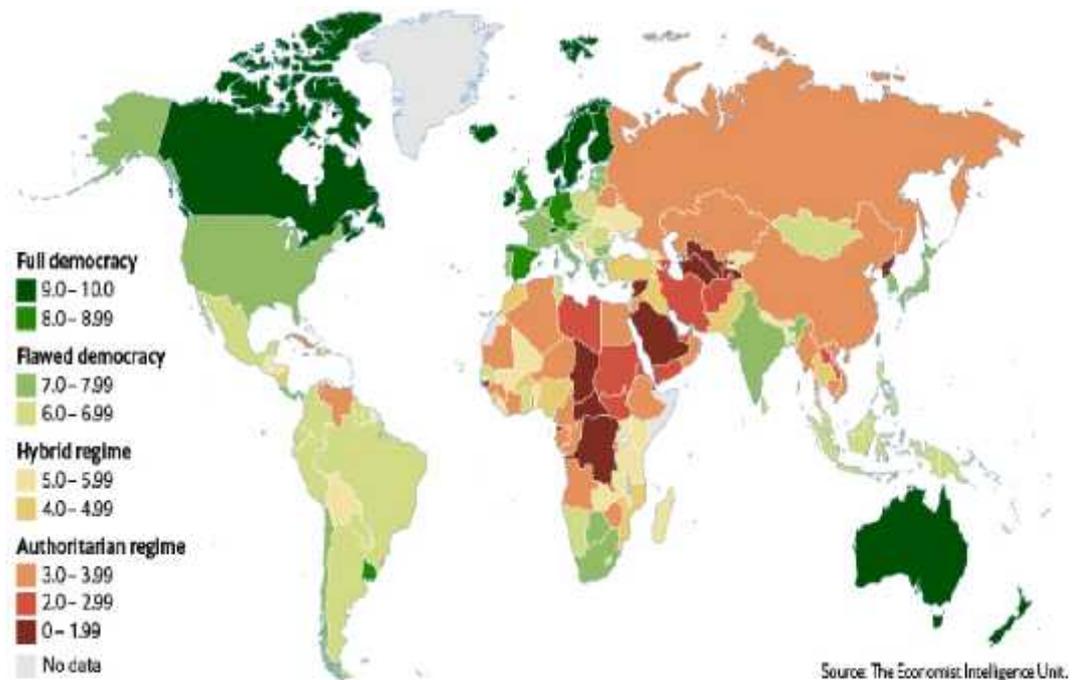
Kenyataan membuktikan, sampai saat ini demokrasi tetap merupakan hasil budaya dan pemikiran politik manusia yang unggul dan mengagumkan. Bergulirnya arus demokrasi di berbagai negara berimplikasi langsung terhadap sistem hukumnya. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi tidak lagi bisa menutup diri dihadapan negara-negara lain. Ketika sebuah negara tidak menganut sebuah sistem demokrasi, negara tersebut harus siap menerima konsekuensi untuk dikucilkan oleh negara lain. Ada juga negara yang dalam bentuk pemerintahannya tidak menggunakan sistem demokrasi, melainkan kerajaan. Seperti negara Arab Saudi dan Inggris. Namun, mereka tetap harus menerima kenyataan untuk selalu membuka diri terhadap negara-negara lain.

Penerapan dan aktualisasi demokrasi dalam berbagai belahan dunia dirasakan telah membawa kemajuan dalam kehidupan budaya berpolitik umat manusia sampai pada pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga nasional, serta percepatan tingkat GDP. Hal penting dalam pencapaian pembangunan antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar, peningkatan standar hidup, serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial (Todaro dan Smith, 2011).

Gründler dan Krieger (2015) dalam penelitian yang berjudul “*Democracy and Growth*” menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara demokrasi dan GDP. Demokrasi berpengaruh terhadap pertumbuhan GDP pada negara dengan investasi yang lebih tinggi. Hampir setengah abad, pemikiran bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tingkat pembangunan ekonomi suatu negara dengan demokrasi menjadi sebuah teori yang penting dalam ilmu sosial.

Pada 1959, Seymour Martin Lipset menulis esainya yang terkenal “*Some Social Requisites of Democracy*” yang merupakan sebuah kajian yang sangat kuat memotret hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan demokrasi (Hameiri dan Kanishka, 2011).

Menurut *Human Development Index (HDI) United Nations Development Programme (UNDP)*, di antara 40 negara maju, hanya tiga negara kerajaan kecil kaya minyak yaitu Kuwait, Bahrain, dan Brunei yang masuk negara tidak demokratis. Dan dari 50 negara paling makmur, hanya dua negara saja yang menjadi pengecualian dan itu pun negara kecil kaya minyak, Qatar dan Uni Emirat Arab (UNDP, 2015), berikut gambaran indeks demokrasi negara-negara di dunia:



Gambar 1. Indeks Demokrasi Negara Dunia Tahun 2017
 Sumber: <https://www.eiu.com/topic/democracy-index>

Pada Gambar 1 terlihat bahwa dari 165 negara diklasifikasikan setiap negara sebagai demokrasi penuh, demokrasi yang cacat, rezim hibrida dan rezim otoriter. Meskipun hampir separuh penduduk dunia hidup dalam demokrasi, hanya 4,5%

berada dalam demokrasi penuh. Berikut rangkuman klasifikasi indeks demokarasi didunia Tahun 2017:

Tabel 1. Indeks Demokrasi Berdasarkan Tipe Rezim, Tahun 2017

	Jumlah Negara	% dari Negara	% dari Populasi
Demokrasi Penuh	19	11,4	4,5
Demokrasi Cacat	57	34,1	44,8
Rezim Hibrida	39	23,4	16,7
Rezim Otoriter	52	31,1	34,0

Sumber: Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017

Tabel 1 memperlihatkan hanya 4,5% berada dalam demokrasi penuh, dan 44,8% pupulasi dunia berada pada demokrasi yang cacat, dan 34% berada pada rezim yang otoriter dengan persentase 3,26%, hal ini menjadi acuan untuk melakukan penelitian bagaimana pengaruh demokrasi terhadap GDP di negara-negara yang menerima prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Mengacu dari penelitian Zouhaier dan Karim (2012) yang menggunakan alat ukur demokrasi yaitu aspek kebebasan sipil dan hak politik, hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara demokrasi dengan GDP.

Pada umumnya, definisi GDP menurut McEachern (2000), adalah jumlah nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. *Gross Domestic Product* juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu. Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Mankiw (2007), yang mengatakan GDP sebagai jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. *Gross Domestic Product* mengukur nilai total

barang dan jasa suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan. Pandangan kedua ahli ini sama seperti yang dikatakan oleh Sadono (2010), GDP adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).

Menurut Mc Eachern (2000: 146), “GDP mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan perekonomian pada suatu saat.” Sedangkan menurut Sukirno (2004: 17), GDP menggambarkan tingkat produksi suatu negara yang dicapai dalam waktu satu tahun dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka GDP mempunyai peranan yang penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun.

Maka dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perekonomian negara yang baik, salah satunya ditunjukkan oleh pembangunan ekonomi yang tinggi, dimana pembangunan ekonomi ini dapat ditunjukkan oleh GDP sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut teori Keynes, GDP terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto.

Gross Domestic Product menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GDP berhubungan erat dengan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Hadi (2009), bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah

tingkat Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP). Penelitian ini menggunakan GDP sebagai simbol pembangunan ekonomi dan mencoba memperhitungkan faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi pembangunan ekonomi seperti faktor demokrasi, pemerintah yang sehat dan FDI.

GDP tidak hanya mencerminkan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi suatu negara saja, tetapi juga GDP mencerminkan kesejahteraan penduduk pada suatu negara. GDP dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, GDP per orang (kapita) memberi tahu kita pendapatan dan pengeluaran dari rata-rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, GDP per orang (kapita) sepertinya merupakan ukuran kesejahteraan rata-rata perorangan yang cukup alamiah. GDP per kapita memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata-rata penduduk, namun di belakang rata-rata tersebut terdapat perbedaan yang besar antara berbagai pengalaman yang dialami orang-orang. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa GDP merupakan ukuran kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, namun tidak untuk semua tujuan (Mankiw,2006).

Hubungan demokrasi dengan GDP tidak selalu menimbulkan dampak yang positif. Dalam beberapa kasus, demokrasi justru dapat menghambat GDP pada suatu negara. Lowenthal, dalam Nugroho (2012) berpendapat bahwa dalam sistem demokratis yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut kebebasan dan hak-haknya secara tidak terbatas terkadang dapat menghambat hal-hal penting yang perlu dilakukan bagi pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi

terhambat, maka GDP juga terhambat karena pembangunan ekonomi berjalan lurus searah dengan kenaikan tingkat GDP.

Lee Kuan Yew (mantan PM Singapore) dalam tesisnya mengatakan bahwa "Demokrasi akan merusak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara". Hipotesis ini diterapkan di negara Singapura dan terbukti GDP nya sangat tinggi sampai sekarang. Penelitian Lee menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi masyarakat harus rela mengorbankan sedikit kemerdekaan sipil dan hak-hak politik. Singapura, yang mempertahankan ekonomi pasar yang sangat terbuka dan menarik banyak investasi asing, tidak melindungi kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara dan berekspresi. Jika masyarakat sudah mencapai taraf hidup yang tinggi, kemerdekaan dan demokrasi bukan lagi sebuah kebutuhan (Nugroho, 2012).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah organisasi yang didirikan untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan yang dibentuk pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II. Dipilihnya negara OECD sebagai objek penelitian dikarenakan bahwa Anggota OECD merupakan unsur pemerintah dari negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. OECD menyatakan diri sebagai sebuah organisasi internasional yang berisi negara-negara maju yang menerima prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Jumlah Negara yang telah berjanji untuk tunduk pada Pedoman OECD adalah 42 negara termasuk 34 negara Anggota OECD. 8 negara non-anggota yang berjanji untuk tunduk pada pedoman OECD adalah Argentina, Brazil, Mesir, Latvia, Lithuania, Maroko, Peru, dan Rumania.

Berikut adalah data *Gross Domestic Product* (GDP) pada negara-negara yang tergabung dalam OECD:

Tabel 2. GDP Negara OECD Tahun 2013-2017 (Dalam Dollar AS).

No	Negara	2013	2014	2015	2016	2017
1	USA	53.107	55.033	56.803	57.904	59.928
2	AUS	68.043	62.403	56.644	49.938	53.794
3	AUT	50.717	51.717	44.177	45.103	47.381
4	NLD	52.184	52.830	45.175	46.008	48.483
5	BEL	46.680	47.355	40.432	41.455	43.467
6	CHL	15.941	14.794	13.737	13.961	15.346
7	CZE	19.916	19.745	17.716	18.463	20.380
8	DNK	61.191	62.549	53.255	54.467	57.219
9	EST	19.072	20.247	17.412	18.228	20.200
10	FIN	49.638	49.915	42.495	43.493	45.805
11	HUN	13.668	14.198	12.504	12.840	14.279
12	GBR	42.938	46.968	44.472	40.540	39.954
13	IRL	51.665	55.628	61.909	63.559	68.885
14	ISL	49.522	54.242	52.429	61.758	71.312
15	ISR	36.344	37.734	35.855	37.372	40.544
16	ITA	35.370	35.397	30.171	30.830	32.110
17	JPN	40.454	38.109	34.568	38.972	38.430
18	DEU	46.531	48.143	41.395	42.443	44.666
19	CAN	52.418	50.633	43.327	42.106	44.871
20	KOR	25.890	27.811	27.105	27.608	29.743
21	LUX	113.625	118.824	100.428	101.306	104.499
22	MEX	10.401	10.582	9.298	8.450	8.910
23	NOR	103.059	97.200	74.522	70.942	75.704
24	POL	13.780	14.345	12.556	12.431	13.864
25	PRT	21.619	22.078	19.253	19.977	21.291
26	FRA	42.593	43.009	36.613	36.870	38.484
27	SVK	18.192	18.630	16.182	16.544	17.579
28	SVN	23.358	24.202	20.873	21.650	23.601
29	ESP	29.212	29.623	25.817	26.622	28.208
30	SWE	60.348	59.242	50.833	51.618	53.253
31	CHE	85.112	86.606	82.082	80.038	80.343
32	NZL	42.949	44.561	38.649	40.332	42.583
33	TUR	12.543	12.127	10.985	10.863	10.546
34	GRC	21.875	21.761	18.168	18.116	18.885

Sumber: <https://data.worldbank.org>

Dari data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa GDP di negara-negara yang tergabung dalam OECD sangat variatif. Nilai GDP yang tertinggi adalah Luksemburg pada tahun 2014 sebesar 118.824 dollar AS, sedangkan yang

terendah adalah Meksiko sebesar 8.450 dollar AS. Sedangkan untuk rata-rata GDP tertinggi dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah Luksemburg sebesar 107.736,4 dollar AS, sementara yang terendah adalah Meksiko sebesar 9.528,2 dollar AS. Negara-negara tersebut telah menerapkan demokrasi pada pemerintahannya, namun GDP menunjukkan hasil yang variatif yang bahkan dapat berbeda jauh antara satu negara dengan negara yang lainnya. Faktanya, meskipun semua negara OECD menerapkan demokrasi pada pemerintahannya, namun hasil survey membuktikan bahwa besarnya nilai demokrasi pada suatu negara bisa berbeda-beda meskipun sama-sama tergolong negara maju.

Pada tabel 3 dapat dilihat angka Indeks Demokrasi di negara-negara yang tergabung dalam OECD pada tahun 2013 sampai 2017. Indeks demokrasi pada tabel 3 merupakan gabungan angka rata-rata dari indeks hak-hak politik dan kebebasan sipil. Hak-hak politik dari *Freedom House* mengevaluasi 3 kategori, yaitu proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, dan berfungsinya pemerintahan.

Sedangkan kebebasan sipil dari *Freedom House* mengevaluasi hal-hal seperti kebebasan berekspresi dan berkeyakinan (agama), hak-hak asosiasional dan organisasi, supremasi hukum, dan otonomi pribadi serta hak-hak individu. Dalam tabel 3 terdapat besaran angka yang menunjukkan apakah demokrasi kuat atau tidak. Hal ini ditunjukkan dengan angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) yang mana semakin besar angka tersebut (maksimal 10), maka demokrasi [ada suatu negara tergolong kuat. Sebaliknya, semakin rendah angkanya (maksimal 1), maka semakin lemah demokrasi pada suatu negara. Berikut adalah indeks demokrasi negara-negara yang tergabung dalam OECD:

Tabel 3. Indeks Demokrasi Negara-negara OECD

No	Negara	2013	2014	2015	2016	2017
1	USA	8,11	8,11	8,05	7,98	7,98
2	AUS	9,13	9,01	9,01	9,01	9,09
3	AUT	8,48	8,54	8,54	8,41	8,42
4	NLD	8,84	8,92	8,92	8,8	8,89
5	BEL	8,05	7,93	7,93	7,77	7,78
6	CHL	7,8	7,8	7,84	7,78	7,84
7	CZE	8,06	7,94	7,94	7,82	7,62
8	DNK	9,38	9,11	9,11	9,2	9,22
9	EST	7,61	7,61	7,74	7,85	7,79
10	FIN	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03
11	HUN	6,96	6,9	6,84	6,72	6,64
12	GBR	8,31	8,31	8,31	8,36	8,53
13	IRL	8,68	8,72	8,85	9,15	9,15
14	ISL	9,65	9,58	9,58	9,5	9,58
15	ISR	7,53	7,63	7,77	7,85	7,79
16	ITA	7,85	7,85	7,98	7,98	7,98
17	JPN	8,08	8,08	7,96	7,99	7,88
18	DEU	8,31	8,64	8,64	8,63	8,61
19	CAN	9,08	9,08	9,08	9,15	9,15
20	KOR	8,06	8,06	7,97	7,92	8
21	LUX	8,88	8,88	8,88	8,81	8,81
22	MEX	9,91	6,68	6,55	6,47	6,41
23	NOR	9,93	9,93	9,93	9,93	9,87
24	POL	7,12	7,42	7,09	6,83	6,67
25	PRT	7,65	7,79	7,79	7,86	7,84
26	FRA	7,92	8,04	7,92	7,92	7,8
27	SVK	7,35	7,35	7,29	7,29	7,16
28	SVN	7,88	7,57	7,57	7,51	7,5
29	ESP	8,02	8,05	8,3	8,3	8,08
30	SWE	9,73	9,73	9,45	9,39	9,39
31	CHE	9,09	9,09	9,09	9,09	9,03
32	NZL	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
33	TUR	5,63	5,12	5,12	5,04	4,88
34	GRC	7,65	7,45	7,45	7,23	7,29

Sumber: <https://theglobaleconomy.com> , *Freedom House*.

Selain demokrasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat GDP. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan penelitian maka teori GDP pun semakin meluas cakupannya. Seperti yang dikemukakan oleh Guan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul *Growth Theory Needs an Institutional Structure* yang mengungkapkan bahwa Teori

Pertumbuhan Neoklasik dan Endogen yang di pelopori oleh Solow dan Romer tidaklah cukup untuk menjelaskan variasi GDP, karena kedua teori tersebut mengabaikan struktur pemerintah. Padahal pemerintah diyakini akan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai GDP. Hal ini didukung oleh penelitian Brunetti dan Weder (1997) yang membuktikan bahwa Efektivitas dan kredibilitas pemerintah berkontribusi positif terhadap perekonomian.

Indeks Efektivitas Pemerintah menangkap persepsi tentang kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas rumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintahan terhadap kebijakan semacam itu. Pada tabel 4, kuatnya efektivitas pemerintah ditunjukkan dengan angka yang lebih tinggi (maksimal 2,5), sedangkan angka yang lebih rendah menunjukkan lemahnya efektivitas pemerintahan (maksimal -2,5). Efektivitas pemerintahan yang terkuat terdapat di Finlandia pada tahun 2013 dengan nilai 2,17. Sedangkan efektivitas pemerintah yang terlemah terdapat di Mexico dengan nilai -0,03 pada tahun 2017.

Menurut Ali dalam (Septiani, 2014) bahwa kebebasan ekonomi menggambarkan sebuah pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kualitas sebuah pemerintahan (government effectiveness) diyakini akan semakin memberikan efek positif pada GDP. Berikut merupakan indeks efektivitas pemerintah (*government effectiveness index*) negara-negara yang tergabung dalam OECD dari tahun 2013 sampai dengan 2017:

Tabel 4. Indeks Efektivitas Pemerintah (2013 – 2017).

No	Negara	2013	2014	2015	2016	2017
1	USA	1,52	1,47	1,46	1,48	1,55
2	AUS	1,64	1,61	1,56	1,57	1,54
3	AUT	1,59	1,57	1,48	1,51	1,46
4	NLD	1,78	1,82	1,83	1,83	1,85
5	BEL	1,61	1,38	1,44	1,33	1,18
6	CHL	1,26	1,16	1,09	1,02	0,85
7	CZE	0,89	1,02	1,05	1,05	1,02
8	DNK	1,99	1,82	1,85	1,88	1,8
9	EST	0,97	1,02	1,07	1,1	1,12
10	FIN	2,17	2	1,81	1,83	1,94
11	HUN	0,65	0,53	0,5	0,46	0,51
12	GBR	1,5	1,63	1,74	1,6	1,41
13	IRL	1,49	1,6	1,53	1,33	1,29
14	ISL	1,49	1,49	1,49	1,39	1,45
15	ISR	1,25	1,21	1,39	1,35	1,39
16	ITA	0,46	0,37	0,45	0,54	0,5
17	JPN	1,62	1,81	1,78	1,82	1,62
18	DEU	1,54	1,73	1,74	1,73	1,72
19	CAN	1,79	1,76	1,76	1,78	1,85
20	KOR	1,13	1,16	1,01	1,07	1,08
21	LUX	1,63	1,65	1,72	1,69	1,68
22	MEX	0,35	0,2	0,21	0,14	-0,03
23	NOR	1,88	1,83	1,86	1,87	1,98
24	POL	0,72	0,83	0,8	0,7	0,63
25	PRT	1,23	0,99	1,22	1,21	1,33
26	FRA	1,48	1,4	1,44	1,41	1,35
27	SVK	0,79	0,88	0,84	0,9	0,81
28	SVN	1,01	1,01	0,97	0,13	1,17
29	ESP	1,15	1,16	1,17	1,12	1,03
30	SWE	1,91	1,8	1,82	1,77	1,84
31	CHE	1,82	2,11	2	2,01	2,06
32	NZL	1,76	1,93	1,88	1,84	1,77
33	TUR	0,38	0,37	0,22	0,02	0,07
34	GRC	0,46	0,4	0,26	0,23	0,31

Sumber: <https://theglobaleconomy.com>, *The World Bank*.

Berikut negara-negara OECD yang menerima investasi asing langsung terbanyak selama lima tahun berdasarkan data dari World Bank Group:

Tabel 5. Foreign Direct Investment, per GDP (% , 2013- 2017)

No	Negara	2013	2014	2015	2016	2017
1	USA	5,425489	4,576457	8,962252	8,539224	5,920912
2	AUS	0,793582	1,012698	0,795343	0,785493	0,79154
3	AUT	0,008899	0,03311	-0,18047	-0,64014	0,329416
4	NLD	6,298545	2,225715	4,002274	3,513901	6,528947
5	BEL	-0,60786	-0,50535	-0,60017	1,072402	-0,90832
6	CHL	1,306339	1,604417	1,532455	0,886324	0,418245
7	CZE	0,36943	0,409665	0,095956	0,587683	0,45192
8	DNK	0,011118	0,105155	0,034753	0,140019	0,041199
9	EST	0,057604	0,087962	-0,04103	0,051528	0,076988
10	FIN	-0,09953	0,345462	0,396361	0,103555	0,309967
11	HUN	-0,27598	0,907627	-0,44124	5,381525	-0,9443
12	GBR	1,268635	1,253851	1,019368	6,556761	1,619014
13	IRL	0,96699	1,559742	3,801657	1,245516	-0,04988
14	ISL	0,009543	0,014136	0,021854	-0,01727	-0,0984
15	ISR	0,325837	0,160304	0,316165	0,320778	0,448133
16	ITA	0,552175	0,481062	0,440797	0,636919	0,287611
17	JPN	0,263221	0,518304	0,15194	1,009007	0,490174
18	DEU	1,448662	0,410827	1,30736	1,367863	1,745942
19	CAN	1,279087	1,265968	1,422714	0,822024	0,613442
20	KOR	0,493109	0,333446	0,151414	0,438431	0,573341
21	LUX	0,172638	0,191434	0,11272	0,445417	0,063376
22	MEX	4,574672	2,925489	3,955117	4,191248	3,605573
23	NOR	-0,01345	0,033741	0,088557	-0,25914	0,021697
24	POL	0,057692	1,378581	1,199791	1,473859	0,769861
25	PRT	0,499793	0,597379	0,13019	0,471652	0,470751
26	FRA	0,741655	0,135079	1,169061	1,229981	1,230002
27	SVK	0,05518	-0,01946	0,093918	0,286591	0,336853
28	SVN	0,004451	0,042115	0,082855	0,066791	0,04584
29	ESP	1,789953	1,177786	0,981915	1,494092	0,219926
30	SWE	0,021824	-0,14558	0,171269	0,153252	0,59209
31	CHE	-0,29287	0,242514	1,411907	0,755614	0,471279
32	NZL	-0,00162	0,072913	-0,00192	0,051956	0,05036
33	TUR	1,081344	1,08176	1,63881	1,228329	1,032225
34	GRC	0,134649	0,123928	0,069811	0,148918	0,189101

Sumber: <https://data.worldbank.org>

Bagi negara yang sedang berkembang pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang baik untuk memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi yang akan berdampak pada kenaikan tingkat GDP, maka salah satu cara untuk mendapatkan suntikan modal adalah dengan menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment /FDI*).

Berdasarkan data pada Tabel 5, terlihat bahwa aliran dana asing masuk terbesar dimiliki oleh Amerika Serikat (USA) dengan nilai 8,962252% pada tahun 2015. Dengan rata-rata terbesar dengan nilai 6,6848668%. Investasi asing langsung datang salah satunya disebabkan kebijakan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam beberapa dekade terakhir banyak negara mulai melakukan liberalisasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi asing langsung. Dalam hal tertentu, investasi asing langsung hanyalah pelengkap investasi domestik. Namun, dalam perkembangannya investasi asing langsung memiliki peranan penting dalam investasi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ernita dkk (2013) yang memberikan bukti bahwa Investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap GDP.

Penelitian ini dilakukan terhadap negara yang tergabung dalam forum Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dengan alasan bahwa OECD merupakan unsur pemerintah dari negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. OECD menyatakan diri sebagai sebuah organisasi internasional yang berisi negara-negara maju yang menerima prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Demokrasi Terhadap GDP di Negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, demokrasi ternyata memiliki dampak yang positif dan negatif dalam penerapannya pada suatu negara. Maka, perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah demokrasi berpengaruh terhadap GDP di negara yang tergabung dalam OECD?
2. Apakah *government effectiveness* berpengaruh terhadap GDP di negara yang tergabung dalam OECD?
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap GDP di negara yang tergabung dalam OECD?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh demokrasi terhadap GDP di negara yang tergabung dalam OECD.
2. Untuk mengetahui pengaruh *government effectiveness* terhadap GDP di negara yang tergabung dalam OECD.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap GDP di negara yang tergabung dalam OECD.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh demokrasi, *government effectiveness* dan investasi terhadap GDP.

2. Bagi masyarakat ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangannya ilmu khususnya tentang pengaruh demokrasi terhadap GDP.
3. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. *Gross Domestic Product (GDP)*

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang pas dan sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah *Gross Domestic Product (GDP)*. Selain itu, GDP juga mengukur dua hal pada saat bersamaan : total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Pengertian dari GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Namun, dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata-rata

penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw, 2007). Ia juga menambahkan bahwa GDP juga tidak mencakup barang-barang yang tidak pernah memasuki pasar karena diproduksi dan dikonsumsi dalam rumah tangga (Mankiw, 2007).

Menurut Imamul Arifin & Gina Hadi W (2009:11) “Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB)”. Beberapa alasan digunakannya PDB (bukan PNB) sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini, peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (circular flow concept). Artinya, perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Baiquni, 2004).

Sukirno (2004) menambahkan, bahwa Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan:

1. Tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan
2. Perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu.

Teori Keynes mengemukakan ada faktor baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi GDP. GDP terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor neto (NX).

GDP tidak hanya mencerminkan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi suatu negara saja, tetapi juga GDP mencerminkan kesejahteraan penduduk pada suatu negara. GDP dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, GDP per orang (kapita) memberi tahu kita pendapatan dan pengeluaran dari rata-rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih

tinggi, GDP per orang (kapita) sepertinya merupakan ukuran kesejahteraan rata-rata perorangan yang cukup alamiah. GDP per kapita memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata-rata penduduk, namun di belakang rata-rata tersebut terdapat perbedaan yang besar antara berbagai pengalaman yang dialami orang-orang. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa GDP merupakan ukuran kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, namun tidak untuk semua tujuan (Mankiw, 2007).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GDP berhubungan erat dengan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Hadi (2009), bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP).

B. Tinjauan Tentang Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “*demos*” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.

Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa. Konsep demokrasi semula berawal dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum Masehi sampai abad ke 6 Masehi. Saat itu pelaksanaan demokrasi dipraktikan secara langsung (*direct democracy*) artinya rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur mayoritas (Sulardi, 2012).

Helliwell dalam (Septiani, 2014) mengungkapkan bahwa demokrasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya demokrasi, kesempatan rakyat untuk menyuarakan pemikiran dan pendapat terbuka dengan luas. Pemikiran dan pendapat rakyat yang disampaikan kepada pemerintah, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan.

Lipset (1960) mengatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa, semakin besar peluang negara itu untuk berdemokrasi. Menurut Lipset, sangat erat hubungan antara demokrasi dengan pembangunan sosial-ekonomi atau tingkatan modernisasi yang dicapai, karena modernisasi dan hasil pembangunan yang berujud pada kesejahteraan akan selalu disertai oleh sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi, yakni meningkatnya tingkat mutu pendidikan dan pembangunan media massa.

Jalan pemikiran Lipset dapat digambarkan demikian: Kehidupan ekonomi yang lebih baik akan memberikan kesempatan untuk memperoleh tingkat pendidikan dan akses media massa yang lebih tinggi. Jenjang yang lebih tinggi pada aspek-aspek tersebut sudah tentu merupakan salah satu faktor kondusif bagi munculnya tuntutan-tuntutan yang lebih besar akan demokrasi. Pendidikan dapat membuka cakrawala pemikiran seseorang termasuk di dalamnya tentang politik, ideologi. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi membuat seseorang menjadi lebih menyadari akan kedudukan dan martabatnya. Mereka itu tidak puas hidup di bawah rejim otoriter yang represif. Mereka menuntut partisipasi yang lebih besar dan luas dalam pembangunan.

Akan tetapi, temuan Lipset ini seolah menjadi tidak berarti ketika banyak negara berkembang yang lepas dari penjajahan dan berdiri sebagai negara baru, serta umumnya mengikuti jejak modernisasi, pada akhirnya tidak seperti dikemukakan itu. Boleh saja modernisasi melahirkan kesejahteraan yang mendorong ke arah demokratisasi dan itu terjadi di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, tetapi tidak demikian halnya dengan Korea Selatan, Taiwan, serta negara-negara Amerika Latin yang ternyata tidak melahirkan demokrasi tetapi melahirkan otoriterisme. Padahal negara-negara itu pembangunan ekonominya tergolong cepat disertai dengan distribusi pendapatan yang cukup merata.

Moore (1996) berpendapat bahwa bukan kemajuan ekonomi yang mendasari pertumbuhan demokrasi melainkan suasana yang demokratis yang memungkinkan kemajuan ekonomi. Dengan adanya demokrasi maka itu berarti sudah terbuka ruang kebebasan di dalam masyarakat. Dengan itu para penguasa yang didukung

oleh para pemodal atau tuan tanah tidak lagi dapat bertindak tanpa memperhatikan apa maunya masyarakat melainkan ia harus sungguh-sungguh mendengarkan mereka.

Bertolak dari pengalaman beberapa negara berkembang maka analisis Moore tidak terbukti. Beberapa negara berkembang berhasil membangun ekonomi menjadi maju, bahkan kelas-kelas sosial relatif tumbuh menjadi maju, dan masyarakat sipilnya relatif terbangun, namun demokrasi masih saja kehabisan tenaga untuk berkembang. Bagi para pendukung pendekatan otoriter yakin bahwa demokrasi justru menghambat pembangunan ekonomi. Lowenthal, dalam Nugroho (2012) misalnya, berpendapat bahwa dalam sistem demokratis yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut kebebasan dan hak-haknya secara tidak terbatas terkadang dapat menghambat hal-hal penting yang perlu dilakukan bagi pembangunan ekonomi. Korea Selatan dianggap sebagai contoh sukses negara otoriter yang mampu membangun negerinya dengan kemajuan ekonomi yang cemerlang.

Lee Kuan Yew (mantan PM Singapore) dalam Tesisnya mengatakan bahwa *"Demokrasi akan merusak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu Negara"*. Hipotesis ini diterapkan di negara Singapura dan terbukti pertumbuhan ekonominya sangat tinggi sampai sekarang. Tesis Lee menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi masyarakat harus rela mengorbankan sedikit kemerdekaan sipil dan hak-hak politik. Singapura, yang mempertahankan ekonomi pasar yang sangat terbuka dan menarik banyak investasi asing, tidak melindungi kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara dan berekspresi. Jika

masyarakat sudah mencapai taraf hidup yang tinggi, kemerdekaan dan demokrasi bukan lagi sebuah kebutuhan (Nugroho, 2012).

Lebih jauh, nilai-nilai Asia (*Asian Values*) yang menjadi inti sari dari Tesis Lee meyakini adanya kecenderungan budaya untuk patuh kepada otoritas yang lebih tinggi dan pekerja keras memungkinkan Negara-negara Asia Timur menciptakan kebijakan ekonomi yang liberal namun tanpa demokrasi. Misalnya pengalaman Korea Selatan di bawah Park Chang-Sun, juga Malaysia di bawah Mahathir dan Indonesia di bawah Soeharto dengan mantra stabilitas politik yang bisa memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi (Nugroho, 2012).

Berbeda halnya dengan North (1990) dalam (Rüland, 2014) yang mengatakan bahwa secara teoritis, menjalankan pemerintahan secara otoriter butuh biaya yang besar dan sangat tidak efisien. Inefisiensi mengakibatkan lemahnya kinerja ekonomi. Selain itu, demokrasi dianggap lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Namun Huntington (1968) dalam (Rüland, 2014) justru mengatakan hal yang sebaliknya bahwa demokrasi justru tidak efisien. Dalam demokrasi, proses pengambilan keputusan bisa terkesan lambat. Pemerintahan yang demokratis juga berpotensi tunduk atas tekanan populasi sedangkan pemerintah yang otoriter dapat mengambil keputusan dengan orientasi jangka panjang (Rüland, 2014).

Beberapa pendapat menyebutkan, negara diktator sangat baik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi karena politik demokrasi sangat lamban, dan negara otoriter sangat cepat mendorong keputusan politik seperti reformasi ekonomi.

Negara non demokratis sangat positif untuk mengupayakan sumber daya yang terbatas untuk langsung diberdayakan untuk aktivitas yang langsung memberikan output ekonomi.

Argumen dari Amartya Sen (2001) juga menekankan, tujuan akhir dari pembangunan adalah kebebasan dalam arti luas. Demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kebebasan politik, jika pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan kebebasan di bidang ekonomi. Di dalam negara demokrasi tidak selalu membawa kemakmuran, tetapi di negara-negara demokrasi tidak pernah ada kelaparan karena pemerintahnya sangat tanggap terhadap permasalahan-permasalahan rakyatnya.

Salah satu pilar dalam demokrasi adalah lembaga. Londregan dan Poole (1990), mengatakan bahwa lembaga demokrasi dapat membahayakan growth. Ide dasar yang melandasi ini bahwa para pembuat kebijakan di pemerintahan demokratis tunduk pada tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, kebijakannya mengarah pada peningkatan peluang mereka dalam pemilihan kembali bukan kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

Orang-orang yang duduk di lembaga khususnya di lembaga perwakilan memegang peranan penting dalam pengawasan pengambilan kebijakan publik sehingga adanya usaha penyalahgunaan wewenang akan sangat merugikan masyarakat yang juga berdampak pada kondisi ekonomi. Terlebih lagi, orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut merupakan hasil dari proses demokrasi

yang membutuhkan banyak biaya sehingga motivasi anggota lembaga perwakilan memungkinkan berubah haluan untuk kepentingan pribadi.

Demokrasi dalam penelitian ini mengacu dari freedomhouse.org yang menyatakan bahwa hak-hak politik merupakan serangkaian hak untuk menjamin terlaksananya sistem politik demokratis, antara lain berupa hak-hak yang menjamin orang untuk bergabung dengan partai-partai dan organisasi politik, berkompetisi untuk menduduki jabatan-jabatan publik, memberikan suara secara bebas untuk calon-calon alternatif melalui pemilihan umum yang absah, dan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar dianggap akan membawa pengaruh nyata terhadap kebijakan publik serta yang bertanggungjawab kepada pemilih. Sementara itu, menurut *Freedom House*, kebebasan sipil meliputi kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak untuk berserikat dan berkumpul, *rule of law*, otonomi pribadi, termasuk kebebasan ekonomi tanpa campur tangan negara (freedomhouse, 2019).

C. *Government Effectiveness*

Pemerintahan atau “*government*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.*” Atau dalam bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya”. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Indonesia “*governance*”

Badan Perancangan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) mencoba untuk mengidentifikasi perbedaan definisi antara *governance* dan *government* sebagai berikut :

1. *Government*

Secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” yaitu lembaga beserta aparturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak rakyat.

2. *Governance*

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/ kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.

Sedangkan kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Soewarno (2006) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”

Pengertian lain menurut Susanto (2007), “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006).

Penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pelayanan publik menuntut pemerintah daerah untuk mengaplikasikan *good governance*, *good governance* memiliki arti yaitu tata pemerintahan yang baik, yang mana sangat erat kaitannya dengan praktek kinerja *governance* yang berkualitas dan profesional dari aparat penyelenggara Negara sebagai pelayanan publik. Dalam konteks pemberantasan KKN, *good governance* juga sering diartikan sebagai pemerintah yang bersih dari praktik KKN, dan *good governance* dinilai terwujud jika pemerintahan mampu

menjadikan diri (terlegitimasi) sebagai pemerintah yang bersi dari praktik KKN, mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Penentu efektivitas pemerintah diambil dari teori ekonomi, politik, dan budaya. La Porta *et al* (1999) menyimpulkan bahwa kualitas pemerintahan terkait erat dengan perbedaan budaya seperti agama atau keragaman etnis. Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-undang telah ditetapkan oleh DPR dan diundangkan oleh pemerintah, dan berbagai kebijakan publik yang dituangkan dalam berbagai bentuk aturan perundang-undangan yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, akan dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah apabila terdapat “birokrasi yang sehat dan kuat”, yaitu “birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara, dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara” .

Variabel efektivitas pemerintahan berhubungan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*). Efektivitas pemerintahan

dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks proses, maka penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan bagaimana tugas, fungsi, dan peran-peran pemerintah dilaksanakan. Dalam konteks output, maka penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan seberapa efektif pencapaian tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini, pemaknaan capaian terkait dengan seberapa baik atau efektif masyarakat memperoleh layanan atau merasakan kepuasan terhadap pemerintah yang memberikan layanan. Menurut Brunetti, Kinsuko dan Weder (1997), efektivitas dan kredibilitas pemerintah berkontribusi positif terhadap perekonomian, serta terciptanya iklim yang kondusif untuk meningkatkan produksi dan investasi.

D. Investasi

Menurut Sukirno (2010) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi ekonomi kedepan dan faktor-faktor lainnya.

Mankiw (2007) berpendapat bahwa investasi terdiri dari barang-barang yang di beli untuk penggunaan di masa depan. Investasi dapat di bedakan dalam tiga macam yaitu investasi tetap bisnis (*business fixed investment*), investasi residensia (*residential investment*), dan investasi persediaan (*inventory investment*). *Business fixed investment* mencakup peralatan dan sarana yang digunakan perusahaan

dalam proses produksinya, sementara *residential investment* meliputi pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik sendiri maupun yang akan disewakan kembali, sedangkan *inventory investment* adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gudang meliputi bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan barang jadi.

Investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok baranga modal terdiri dari pabrik, mesin, kantor, produk- produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Investasi sendiri di bedakan menjadi dua bentuk yaitu investasi langsung seperti Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investement*) dan Penanaman Modal Domestik Nasional (PMDN) serta bentuk lainnya yaitu investasi portofolio yaitu lewat bursa saham.

Investasi dapat diartikan pula sebagai pengeluaran masyarakat untuk memperoleh alat-alat kapital baru. Pengeluaran untuk alat-alat kapital baru ditujukan untuk mengganti alat-alat kapital yang sudah tidak ekonomis dan sebagian lainnya berupa pembelian alat alat kapital baru untuk memperbesar stok kapital. Investasi meliputi pengeluaran uang yang menyebabkan terjadinya perubahan persediaan atas barang barang kapital. Investasi yang dilakukan di sektor bisnis di dasarkan oleh motif untuik memperoleh keuntungan. Dua faktor penting yang menentukan dilakukannya investasi adalah tingkat keuntungan bersih yang diharapkan dari pengusaha dari pengeluaran investasi dan faktor suku bunga.

1. Teori Investasi dari Keynes

Pada bukunya *The General Theory Of Employment Interest and Money* 1936, John Maynard Keynes mendasar teori tentang permintaan investasi atau konsep marjinal kapital (*marginal efficiency of capital* atau MEC). Sebagai suatu definisi kerja, MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran kapital tambahan. Tepatnya, MEC adalah tingkat diskonto yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan.

2. Teori Investasi Langsung

Penanaman modal asing langsung merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta asing ke suatu negara tertentu. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional (subsidiari), lisensi, *joint venture*, atau lainnya. suatu paket modal asing (FDI) adalah berupa: (a) penyerapan tenaga kerja (*employment*), (b) alih teknologi, (c) pelatihan manajerial, dan (d) akses ke pasar internasional melalui ekspor. Dilihat dari sasaran penjualan *outputnya*, perusahaan multinasional dapat dibedakan ke dalam dua kelompok: (a) penanaman modal asing yang berorientasi ke pasar domestik yang biasanya cenderung menggunakan teknologi produksi yang padat modal, dan (b) penanaman modal asing yang berorientasi ke pasar luar negeri yang yang besarnya cenderung menggunakan produksi berteknologi padat karya karena lebih murah.

Menurut Krugman (1988), yang dimaksud dengan penanaman modal asing langsung adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari satu negara memperluas atau mendirikan perusahaan perusahaan. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumberdaya, tetapi juga pemeberlakuan kontrol terhadap perusahaan luar negeri. Investasi langsung berarti bahwa perusahaan dari negara penanaman modal secara langsung melakukan pengawasan atas aset yang ditanam di negara pengimpor modal. Investasi langsung luar negeri dapat mengambil beberapa bentuk yaitu: pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham saham pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor modal-modal atau menaruh aset tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanaman modal (Jinghan,2003)

Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah tentang Penanaman Modal Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) karena lebih memiliki pengaruh untuk jangka panjang dan dapat langsung memberikan andil terhadap pembangunan negara berkembang seperti Indonesia. Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Pengertian penanaman

modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Bila dibandingkan dengan investasi portofolio, penanaman modal asing langsung (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing lebih memberi andil dalam silih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan mengingat masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
Alesina dkk (1996)	<i>Political Instability and Economic Growth</i>	Hasil penelitian menggunakan <i>single equation estimation</i> , demokrasi, revolusi dan kudeta serta pembunuhan karakter berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Barro (1991)	<i>Economic Growth in a Cross-Section of Countries</i>	Hasil analisis menggunakan regresi membuktikan bahwa Revolusi kudeta serta pembunuhan karakter sebagai ukuran ketidakstabilan politik dan ketidak efektifan

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
		pemerintahan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Brunetti A, G. Kinsuko, B. Weder (1997)	Institutional Obstacle to Doing Business: Region by Region Result from a Worldwide Survey of the Private Sector	Hasil analisis menggunakan regresi membuktikan bahwa Efektivitas dan kredibilitas pemerintah berkontribusi positif terhadap perekonomian, melalui iklim yang kondusif untuk meningkatkan produksi, mengurangi impor, dan meningkatkan ekspor.
Dewi Ernita, Syamsul Amar, Efrizon Sofyan (2013)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia Tahun 2005-2010”	Hasil analisis menggunakan regresi membuktikan bahwa Investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk net export, Suku Bunga Berpengaruh signifikan dan negatif terhadap investasi.
Arusha V. Cooray (2009)	Government Expenditure, governance and economic growth	Hasil analisis menggunakan regresi membuktikan bahwa Negara dengan tata kelola yang baik membuat lebih efektif dalam menggunakan belanja publik. Modal Manusia juga terbukti secara signifikan dan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Helliwell, John, (1994)	<i>Empirical Linkages Between Democracy and Economic Growth</i>	Pertumbuhan ekonomi memiliki efek yang kuat dan positif terhadap demokrasi. Sebaliknya, demokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Sumber : Review berbagai jurnal

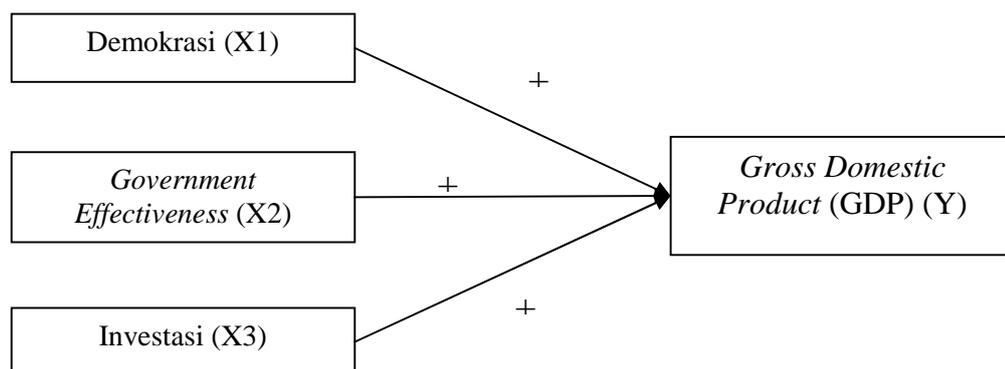
F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba memperhitungkan faktor pendukung lainnya seperti faktor demokrasi, *government effectiveness* dan investasi terhadap perekonomian yang diukur menggunakan *Gross Domestic Product* (GDP). Penerapan dan aktualisasi demokrasi dalam berbagai belahan dunia dirasakan telah membawa kemajuan dalam kehidupan budaya berpolitik umat manusia sampai pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal penting dalam pencapaian pembangunan antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar, peningkatan standar hidup, serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial (Todaro dan Smith, 2011). GDP dapat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain sumber daya manusia, pembentukan modal, maupun teknologi. Selain itu juga dapat didukung dengan adanya demokrasi. Gründler dan Krieger (2015) dalam penelitian yang berjudul “*Democracy and Growth*” menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara demokrasi dan GDP. Demokrasi berpengaruh terhadap perekonomian pada negara dengan investasi yang lebih tinggi.

Selain demokrasi, keadaan pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam melihat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan penelitian maka teori pertumbuhan ekonomi pun semakin meluas cakupannya. Seperti yang dikemukakan oleh Guan (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Teori Pertumbuhan Neoklasik dan Endogen yang di pelopori oleh Solow dan Romer tidaklah cukup untuk menjelaskan variasi pertumbuhan perekonomian. Kedua teori tersebut mengabaikan struktur pemerintah. Padahal pemerintah diyakini akan mampu memberikan penjelasan

yang lebih baik mengenai GDP. Menurut Ali (Septiani, 2014) bahwa kebebasan ekonomi menggambarkan sebuah pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kualitas sebuah pemerintahan diyakini akan semakin memberikan efek positif pada GDP.

Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang baik untuk memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi, maka salah satu cara untuk mendapatkan suntikan modal adalah dengan menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment /FDI*). Kebijakan nasional merupakan kunci daya tarik investasi asing langsung. Dalam beberapa dekade terakhir banyak negara mulai melakukan liberalisasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi asing langsung. Dalam hal tertentu, investasi asing langsung hanyalah pelengkap investasi domestik. Namun, dalam perkembangannya investasi asing langsung memiliki peranan penting dalam investasi secara keseluruhan. Berdasarkan uraian dari latar belakang penulisan, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

G. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat dugaan sementara yaitu :

- Diduga demokrasi berpengaruh terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) di negara yang tergabung dalam OECD.
- Diduga *government effectiveness* berpengaruh terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) di negara yang tergabung dalam OECD.
- Diduga investasi berpengaruh terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) di negara yang tergabung dalam OECD.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder. Data akan diolah menggunakan teknik data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga memberikan informasi observasi setiap subjek dalam sampel. Data sekunder tersebut bersumber dari Economist Intelligence Unit, <https://freedomhouse.org> dan Democracy Index. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Demokrasi Index (DM), Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP), Investasi (FDI) di negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Keseluruhan data berupa data panel tahun 2013 hingga tahun 2017.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Penelitian ini

menggunakan populasi Negara OECD memiliki 34 Negara Anggota, diantaranya adalah Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea, Luxemburg, Mexico, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, dan Amerika.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2013). Variabel-variabel pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, demokrasi, *Government effectiveness* dan investasi sebagai variabel independen.

1. Gross Domestic Product (GDP)

GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. *Gross Domestic Product* (GDP) mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam satu tahun dengan satuan juta dollar.

2. Demokrasi

Indeks demokrasi mengacu pada penelitian Zouhaier dan Karim (2012), memiliki rentang skor 0-10 berdasarkan situs Economist Intelligence Unit's Democracy Index. Indeks demokrasi memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 10, dengan 1 adalah nilai Indeks demokrasi terendah sedangkan 10

adalah nilai Indeks demokrasi tertinggi, berdasarkan situs Economist Intelligence Unit's Democracy Index.

3. *Government Effectiveness*

Government effectiveness (IEP) Variabel efektivitas pemerintahan berhubungan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*). Efektivitas pemerintahan dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks proses, maka penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan bagaimana tugas, fungsi, dan peran-peran pemerintah dilaksanakan. *Government effectiveness* memiliki rentang nilai antara -2,5 sampai dengan 2,5, dengan kuatnya efektivitas pemerintah ditunjukkan dengan angka yang lebih tinggi (maksimal 2,5), sedangkan angka yang lebih rendah menunjukkan lemahnya efektivitas pemerintahan (maksimal -2,5), berdasarkan situs globaleconomy.com.

4. Investasi (FDI)

Variabel investasi dalam penelitian ini merupakan nilai *net Inflows* suatu negara selama satu tahun dibagi nilai GDP, dan dinyatakan dalam persen.

Data FDI dalam penelitian ini bersumber dari *World Development Indicators*.

Tabel 7. Nama Variabel, Simbol, Periode Waktu, Satuan Pengukuran dan Sumber Data

Nama Variabel	Simbol	Periode Waktu	Satuan	Sumber Data
<i>Gross Domestic Product</i>	GDP	Tahunan	Dollar AS	<i>World Bank</i>
Demokrasi	DM	Tahunan	Indeks	<i>Economist Intelligence Unit</i>
<i>Government Effectiveness</i>	IEP	Tahunan	Indeks	<i>theglobaleconomy.com</i>
Investasi	FDI	Tahunan	Persen	<i>World Bank</i>

D. Model Penelitian

Model struktural yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh pengaruh demokrasi, *government effectiveness* dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD yaitu:

$$GDP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 D_{it} + \alpha_2 IEP_{it} + \alpha_3 FDI_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

GDP	: <i>Gross Domestic Product</i> (Dollar AS)
D	: Demokrasi (Indeks)
IEP	: <i>government effectiveness</i> (Indeks)
FDI	: Investasi (Indeks)
<i>i</i>	: Negara Sampel
<i>t</i>	: data time series
ϵ_{it}	: <i>Error term</i>
α_0	: intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: koefisien regresi yang ditaksir

E. Metode Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Menurut Widarjono (2013) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*). Dalam melakukan analisis dan pengujian hipotesis digunakan alat bantu program

komputer *EViews* 9. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel.

a. Analisis Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2013), ketika kita melakukan suatu observasi perilaku unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan atau negara, kita tidak hanya melakukan observasi terhadap unit-unit tersebut dalam waktu yang bersamaan tetapi juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai unit waktu. Misalnya kita melakukan observasi terhadap suatu industri, maka kita tidak hanya akan mengevaluasi besarnya biaya, input, dan output terhadap beberapa tetangga perusahaan dalam satu kurun waktu, tetapi kita akan mengobservasi dalam berbagai kurun waktu. Gabungan dari berbagai unit observasi dan unit waktu tersebut disebut data panel (*panelpooled data*).

Tidak seperti regresi biasanya, regresi data panel melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square*

(*OLS*) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

Model persamaan regresinya adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$: Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien *slope*

ϵ_{it} : Residual (*error term*)

2. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Menurut Widarjono (2013), pendekatan yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep didalam persamaan dikenal dengan model regresi *Fixed Effect Model*. Cara mengestimasi model adalah dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Perbedaan karakteristik perusahaan dalam model ini hanya mengasumsikan intersep yang berubah antar individu dan tetap antar waktu, namun slope tetap antar perusahaan maupun antar waktu. Model estimasi ini juga disebut dengan *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*.

Model pendekatan ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{1it} + \beta_5 D_{2it} + \dots + \beta_n D_{nit} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

X_{1it}, X_{2it} : Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

β_0 : Intersep

β_1, β_2 : Koefisien *slope*

D_{1it}, D_{2it} : Variabel dummy

ϵ_{it} : Residual (*error term*)

3. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Pendekatan variabel dummy dalam *fixed effect model* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi dengan berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai metode *random effect*. Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin akan berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*. Model dari *Random Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

X_{1it}, X_{2it} : Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

- $\bar{\beta}$: Intersep
- β_1, β_2 : Koefisien *slope*
- it : $it + \mu_i$

0 tidak lagi tetap atau non stokastik tetapi bersifat *random*, $\bar{\beta}$ adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi dan μ_i adalah variabel gangguan yang bersifat *random* yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu. Nama metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan it terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh atau kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu. Dalam hal ini μ_i adalah berbeda antar individu dan tetap antar waktu. Karena itu model *random effect* juga sering disebut dengan *Error Component Model (ECM)*. Karena adanya korelasi antara variabel gangguan, maka metode yang tepat untuk digunakan bukanlah OLS melainkan GLS atau *Generalized Least Squares* (Widarjono, 2013).

b. Langkah Penentuan Model Panel

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi panel dilakukan dengan *common effect* atau dengan *fixed effect* dengan melihat residual *sum squares* (Green, 2000). Uji Chow yang didapat kemudian dibandingkan dengan F-tabel dengan sebesar 5%. H0 ditolak jika F-tabel lebih kecil dari nilai . Sebaliknya, H0 diterima jika F-tabel lebih besar dari nilai . Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Menerima Model *Common Effect*, Jika Nilai Uji Chow $<$ F-Tabel

H_a : Menerima Model *Fixed Effect*, Jika Nilai Uji Chow $>$ F-Tabel

2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Uji Hausman didasarkan pada heterogenitas antar individu dan korelasinya dengan variabel bebas. Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah:

H_0 : Mengikuti *Random Effect* Jika Nilai Hausman $<$ Nilai *Chi Square*

H_a : Mengikuti *Fixed Effect* Jika Nilai Hausman $>$ Nilai *Chi Square*

Penerimaan hipotesis nol berarti bahwa tidak ada korelasi antara variabel penjelas dengan efek individu atau dengan kata lain *random effects* dapat digunakan untuk menghasilkan estimator yang lebih efisien. Demikian sebaliknya, penolakan hipotesis nol berarti *random effects* tidak dapat digunakan oleh karena dalam kondisi ini *random effects* menghasilkan estimator yang bias dan tidak konsisten.

3. Uji Lagrange Multiplier (L-M)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) adalah suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* (REM) lebih baik daripada *common effect* melalui metode *pooled least square* (PLS), dengan

menguji metode *random effect* (REM) yang didasarkan pada nilai residual dari metode PLS. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar jumlah variabel bebas. Jika nilai LM statistik lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-squares* maka peneliti menolak hipotesis nul, artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *random effect* (REM) dari metode PLS. Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil daripada nilai kritis statistik *chisquares* maka hipotesis nul diterima, artinya estimasi *random effect* (REM) tidak dapat digunakan untuk regresi panel sehingga digunakan metode PLS.

Hipotesis :

H0: Pilih PLS , jika nilai Hausman LM < *Chi Square*

Ha: Pilih *Random Effect*, jika nilai LM > *Chi Square*

F. Uji Hipotesis

1. Uji t statistik

Pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi parsial dengan menggunakan uji t dengan tingkat keyakinan 95% apabila besarnya varians populasi tidak diketahui, sehingga pengujian hipotesisnya sangat ditentukan oleh nilai-nilai statistiknya.

2. Uji F Statistik

Untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F. Pada penelitian ini dalam melakukan uji F peneliti

menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan $df_1 = (k-1)$ dan $df_2 = (n-k)$, adapun langkah-langkah dalam uji F ini yaitu:

1. Membuat hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \mu_1, \mu_2, \mu_3 = 0 \Rightarrow$ Paling tidak salah satu variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

$H_a : \mu_1, \mu_2, \mu_3 \neq 0 \Rightarrow$ Paling tidak salah satu variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependent secara bersama-sama.

2. Mencari nilai F hitung dan nilai F kritis pada tabel distribusi F. Nilai F kritis berdasarkan besarnya df_1 dan df_2 dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1)$ dan df_2 untuk denominator $(n-k)$. Adapun nilai F hitung dapat dicari dengan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1 - R^2/(n-k)}$$

3. Keputusan menolak atau menerima H_0 sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{kritis}$, maka H_0 ditolak
- b. Jika $F_{hitung} < F_{kritis}$, maka H_0 diterima.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini merupakan studi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh demokrasi, *government effectiveness* dan investasi terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) di negara yang tergabung dalam OECD. Penelitian ini menggunakan populasi Negara OECD memiliki 34 Negara anggota, berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa demokrasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, yang berarti semakin meningkat indeks demokrasi akan meningkatkan GDP di negara yang tergabung dalam OECD.
2. Bahwa *government effectiveness* mempengaruhi GDP secara positif terhadap di negara yang tergabung dalam OECD, selain itu variabel *government effectiveness* menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi *Gross Domestic Product* karena mempunyai nilai koefisien terbesar dibandingkan variabel bebas lainnya.
3. Bahwa investasi berpengaruh secara positif terhadap *Gross Domestic Product* di negara yang tergabung dalam OECD namun tidak signifikan, dengan demikian hipotesis yang menyatakan diduga investasi berpengaruh terhadap *Gross Domestic Product* di negara yang tergabung dalam OECD, ditolak.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh demokrasi, *government effectiveness* dan investasi berpengaruh terhadap *Gross Domestic Product* di negara yang tergabung dalam OECD, didapat nilai koefisien determinasi yang masih rendah sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengembangkan variabel-variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap *Gross Domestic Product* di negara OECD.
2. Dari hasil penelitian terlihat variabel *government effectiveness* menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi *Gross Domestic Product* di negara OECD. Hendaknya pemerintah mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan hasilnya yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Dalam pelaksanaan tersebut dibutuhkan pula pengawas dari warganegara terhadap kinerja pemerintah agar tujuan yang selama ini diinginkan dapat tercapai dan tercipta kualitas pemerintahan yang baik dan seperti yang diharapkan.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang waktu penelitian sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat keakuratan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, Alberto, Sule Ozler, Nouriel Roubini, and Phillip Swagel. 1996. Political instability and economic growth. *Journal of Economic Growth*. doi:10.1007/BF00138862
- Arsyad, Lincolin, 2010. *Ekonomi Pembangunan, Ed. 5*, Yogyakarta : STIE YKPN BPFE.
- Afrizal, Fitrah. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Hasanudin. Makassar
- Aldilla, Rezza. 2011. Analisis pengaruh tenaga kerja dan output Terhadap indeks ketimpangan penyerapan Tenaga kerja industri manufaktur di Kabupaten/kota di wilayah provinsi jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi* Universitas Diponegoro. Semarang
- Arsyad, Lincolin, 1999, *Ekonomi Pembangunan, Ed. 3*, Yogyakarta : STIE YKPN BPFE.
- Barro, Robert J .1991. Economic Growth in a Cross-Section of Countries". *Quarterly Journal of Economic*. Vol 16 (2), 407-433.
- Baiquni, M. 2004. *Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran-Otonomi di Wilayah Kepulauan*. Yogyakarta : Ide As dan PKPEK.
- Brunetti A, G. Kinsuko, B. Weder. (1997). Institutional Obstacle to Doing Business: Region by Region Result from a Worldwide Survey of the Private Sector. *Working Paper* No. 1759.
- Effendy, Onong Uchjana.2008. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. 2002. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi IV. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso, T. SJ ; 2003. *Pengantar ilmu Ekonomi Mikro*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

- Guan, De-Xing. 2008. *Growth Theory Needs an Institutional Structure*. Department of Economics, National Taipei University.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill
- Hakim, Luqman-nul. 2011. ASEAN: Konstruksi Regionalisme Ekonomi Asia Tenggara. *Tesis Pascasarjana*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.
- Hameiri, Shahar dan Kanishka Jayasuriya. 2011. "Regulatory regionalism and the dynamics of territorial politics: The case of the Asia-Pacific region." *Political Studies*. Vol. 59. No.1.
- Hartono, Budiantoro. 2008. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, *Tesis*, Undip, Semarang
- Helliwell, John, 1994. Empirical Linkages Between Democracy and Economic Growth," *British Journal of Political Science* 24, 1994, 225-248.
- La Porta, R., Lopez, de Silanes., Shleifer, A., dan Vishny, R. 1999. Investor protection and corporate valuation. *NBER Working Paper Series*, 7403.
- Lipset, Seymour M. 1960. *Political Man: The Social Bases of Politics*. New York: University of Florida Libraries.
- Londregan, John B. and Keith Poole. 1990. Poverty, The Coup Trap, and the Seizure of Executive Power." *World Politics*, 42(2 Jan.): 151-183.
- Marselina, Tri Joko Prasetyo. 2017. Pengaruh Efektivitas Pemerintah, Kepastian Hukum dan Pengendalian Korupsi terhadap Tingkat Ketaatan Pajak. *Artikel*. Universitas Lampung.
- Mankiw, N. Gregory.2007. *Makroekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- McEachern, A. William. 2000, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moore, Barrington, Jr. 1996, *Social Origin of Dictatorship and Democracy*, Beacon Press, Boston,
- Nopirin, 2009, *Ekonomi Moneter Buku II*, Yogyakarta: BPFR Yogyakarta
- Nugroho, Heru. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012*.
- Pradhan, Rudra P. dan G. S. Sanyal. 2011. Good governance and Human Development: Evidence form Indian States. *Journal of Social and Development Science* Vol. 1, No. 1, pp. 1-8.

- Riyad, Mohammad. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Enam Negara ASEAN tahun 1990-2009*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Rüland, Jurgen. 2014. The Limits of Democratizing Interest Representation: ASEAN's Regional Corporatism and Normative Challenges. *European Journal of International Relations*. No. 20. No.1.
- Sedarmayanti, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Refika Aditama Eresco.
- Sen, Amartya. 2001. Democracy as a Universal Value', in Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds), *The Global Divergence of Democracies* (Baltimore, Md: John Hopkins University Press, 2001), p. 13.
- Septiani, Pipit D. 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan Kestabilan Politik di Indonesia. *Jurnal*. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sigit Winarno, dan Sujana Ismaya. 2007. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Sitepu dan Sinaga. 2005. Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. (Online) (<http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2010/01/dampakinvestasisumberdaya-manusia.html>), di akses 27 Maret 2018)
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soewarno Handayaniingrat. 2006. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono, 2005. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulardi. 2012. Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni. *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- Susanto, Azhar. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Lingga Jaya. Tambunan.Bandung.
- Tiede, Lydia. 2011. *The Rule of Law and Economic Growth: Where are We? World Development*. Vol. 39, No. 5, pp.: 673–685.
- Todaro, Michael P. 2000, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga Edisi 7*, Jakarta : Erlangga.

UNDP.2105, United Nations Development Programme, "Human Development Report," United Nations Development Programme (UNDP), New York

Wibowo, Edy. 2013. Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal*. Universitas Brawijaya, Malang.

Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.

Zouhaier, H. dan Karim. 2012. *Democracy, Investment and Economic Growth*. International Journal of Economics and Financial Issues, 2, 233-240.

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world>

<https://data.worldbank.org>

<http://reports.weforum.org>